

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,70	0,20	1,49	0.298	Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Direksi memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan serta mengatur pola pembagian tugas masing-masing.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	1,40	0,50	2,74	0.411	Dewan Komisaris mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Selama ini belum ada benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,88	0,23	2,11	0.211	Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	1,00	0,20	2,10	0.210	Melaksanakan fungsi pengamanan dan kontrol atas kegiatan kantor, melakukan pemeriksaan sesuai dengan kertas kerja pemeriksaan dan jadwal yang telah disetujui oleh direksi, menyampaikan audit kepada Direktur Utamakan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur (yang membawahkan fungsi kepatuhan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,60	0,20	1,80	0.045	Merupakan profesi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan bank dan informasi laporan dan informasi laporan lainnya di audit oleh Audit Ektern yang merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi bank dan stakeholder.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,67	1,32	0,20	3,19	0.319	Managemen Risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam asset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi baik itu sudah diketahui maupun yang belum, atau yang takterpikirkan yaitu dengan cara memindahkan risiko kepihak lain. Managemen risiko juga bisa disebut suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.225	Dalam melaksanakan Batas maksimum Pemberian Kredit BPR telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan POJK Nomor 49/POJK.03/2017 Tentang Batas maksimum Pemberian Kredit.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,80	0,20	1,67	0.125	Dengan ditetapkannya Rencana Bisnis Bank diharapkan akan memperkokoh landasan operasional utamanya dalam mencapai keseimbangan antara bobot. Visi, Misi dan fungsi sebagai Badan Usaha yang dapat tumbuh dan berkembang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,70	0,15	1,35	0.101	Telah melakukan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan dalam keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu. memadai. jelas. akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya.
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB tahun 2022 telah disahkan oleh Dewan Komisaris PT. BPR BKK KAB. TEGAL (Perseroda)
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada salinan surat edaran otoritas jasa keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang saham sesuai dengan SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2021
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya diterapkan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pelaksanaan pengawasan RBB tahun 2019 dilakukan langsung oleh pemegang saham dengan dilaksanakan kegiatan Desk Triwulan dan semester guna melihat perkembangan capaian RBB tahun 2019
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah disampaikan kepada OJK melalui sistem APOLLO tanggal 13 Desember 2019
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR BKK KABUPATEN TEGAL (Perseroda)
Alamat : Jalan. Projosumarto II talang Tegal
No Telp : 0283. 3447492
Posisi Laporan : 31/12/2022
Modal Inti : Rp. 22,010,304,909,-
Total Aset : Rp. 148,521,230,009,-
Status Audit : 1
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2.1
Peringkat Komposit : 2

KESIMPULAN

1. Aspek struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator sebagian besar telah dilakukan pemenuhan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah disusun dan dikinikan. Walaupun pada beberapa indikator lain masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal namun secara umum cukup mendukung dan memenuhi penerapan tata Kelola BPR. bank juga berupaya dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko terhadap berbagai jenis risiko yang dilihat berdasarkan modal inti dan aset yang telah dimiliki oleh Bank.

2. rangkaian proses dalam penerapan Tata Kelola, sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen Risiko juga telah dilaksanakan terhadap seluruh jenis risiko yang timbul namun Bank tetap memperhatikan agar penerapan Tata Kelola dan penerapan manajemen risiko dapat diterapkan secara penuh pada Bank serta melakukan mitigasi risiko sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan.

3. Aspek outcome/hasil dari penerapan Tata Kelola sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola cukup berkualitas yang dihasilkan dari setiap aspek struktur dan infrastruktur yang juga sebagian besar telah terpenuhi sehingga proses penerapan tata Kelola dapat berjalan dengan efektif.

Tegal, 16 Januari 2023


H. KHOJIN, SH.MM
Direktur Utama




MUHAMMAD MASROFI, S.SOS.M.SI
Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karya Kurnia Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karya Kurnia Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karya Kurnia Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karya Kurnia Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	179712000	2	222541620
2	Tunjangan	2	378385296	0	0
3	Tantiem	2	63652212	2	169739232
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		621749508		392280852

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Pasal 68 Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	pasal 69 (tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan)
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Pasal 69 tidaka ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimal.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Memahami dan telah lulus fit & proper test
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	telah ditunjuk pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan Peraturan Direksi No.581/31/Kep.Dir/IX/2021.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pasal 51 BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Langkah langkah yang telah dilakukan : melakukan sosialisasi tentang aturan baik dari OJK maupun Otoritas lain.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	belum sepenuhnya namun telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai ketentuan terkini pada rapat evaluasi aupun/kunjungan ke cabang dan pelatihan in house training
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	melakukan pembinaan dan arahan kepada pegawai untuk bekerja sesuai dengan Ketentuan Perusahaan maupun aturan OJK dan otoritas lain
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan sistem dan prosedur yang dibuat telah merujuk pada Ketentuan OJK dan perundang undang yang berlaku
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	telah melakukan revidi masih perlu melakukan Update Ketentuan OJK maupun perundang undangan lainnya
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	telah dilakukan upaya penurunan tingkat pelanggaran ketentuan dengan pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	belum menyampaikan secara berkala laporan fungsi kepatuhan kepada Direktur utama dan Dewan Pengawas
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah menyampaikan laporan pokok-pokok fungsi kepatuhan pada tanggal 22 Maret 2019 Nomor surat 65/BPR.BKK/Kab.Tgl/III/2019 dan 24 Maret 2020 dengan Surat Nomor 67/BPR.BKK/Kab.Tgl/III/2020
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama BPR	: PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jalan Projosumarto II Talang Tegal
Nomor Telepon	: 0283 3447492
Modal Inti BPR	: 22.010.304.909,00
Total Aset BPR	: 148.521.230.009,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,1
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: 1. Aspek struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator sebagian besar telah dilakukan pemenuhan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah disusun dan dikinikan. Walaupun pada beberapa indikator lain masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal namun secara umum cukup mendukung dan memenuhi penerapan tata Kelola BPR. bank juga berupaya dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko terhadap berbagi jenis risiko yang dilihat berdasarkan modal inti dan asset yang telah dimiliki oleh Bank. 2. rangkaian proses dalam penerapan Tata Kelola, sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen Risiko juga telah dilaksanakan terhadap seluruh jenis risiko yang timbul namun Bank tetap memperhatikan agar penerapan Tata Kelola dan penerapan manajemen risiko dapat diterapkan secara penuh pada Bank serta melakukan mitigasi risiko sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan. 3. Aspek outcome/hasil dari penerapan Tata Kelola sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola cukup berkualitas yang dihasilkan dari setiap aspek struktur dan infrastruktur yang juga sebagian besar telah terpenuhi sehingga proses penerapan tata Kelola dapat berjalan dengan efektif.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	MUHAMMAD MASROFI, S.SOS,M.SI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Drs.DADANG DARUSMAN, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris belum ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	MUHAMMAD MASROFI, S.SOS,M.SI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Drs.DADANG DARUSMAN, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR BKK KABUPATEN TEGAL (Perseroda)
Alamat : Jalan. Projosumarto II talang Tegal
No Telp : 0283. 3447492
Posisi Laporan : 31/12/2022
Modal Inti : Rp. 22,010,304,909,-
Total Aset : Rp. 148,521,230,009,-
Status Audit : 1
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2.1
Peringkat Komposit : 2

KESIMPULAN

1. Aspek struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator sebagian besar telah dilakukan pemenuhan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah disusun dan dikinikan. Walaupun pada beberapa indikator lain masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal namun secara umum cukup mendukung dan memenuhi penerapan tata Kelola BPR. bank juga berupaya dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko terhadap berbagai jenis risiko yang dilihat berdasarkan modal inti dan aset yang telah dimiliki oleh Bank.


2. rangkaian proses dalam penerapan Tata Kelola, sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen Risiko juga telah dilaksanakan terhadap seluruh jenis risiko yang timbul namun Bank tetap memperhatikan agar penerapan Tata Kelola dan penerapan manajemen risiko dapat diterapkan secara penuh pada Bank serta melakukan mitigasi risiko sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan.

3. Aspek outcome/hasil dari penerapan Tata Kelola sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola cukup berkualitas yang dihasilkan dari setiap aspek struktur dan infrastruktur yang juga sebagian besar telah terpenuhi sehingga proses penerapan tata Kelola dapat berjalan dengan efektif.

Tegal, 16 Januari 2023


H. KHOJIN, SH.MM
Direktur Utama




MUHAMMAD MASROFI, S.SOS.M.SI
Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Pasal 40
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Pasal 44
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Pasal 45
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Pasal 33
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Pasal 44.45 dan 47
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	telah memiliki sistem terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada Pihak terkait. debitur grup dan atau debitur besar berikut monitoring namun belum ada secara tertulis
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	masih menggunakan update ketentuan BMPK yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	tidak ada pelanggaran
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Tidak ada pelanggaran BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	telah di RUPS-LB pada tanggal 17 - 18 Januari 2022
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	hasil audit menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	MUHAMMAD MASROFI, S.SOS,M.SI	Komisaris Utama	1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan, 2. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris, 3. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat, 4. Komisaris utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari, 5. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, 6. memastikan agar para komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat, waktu, dan jelas, 7. membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi, 8. Mengembangkan standar corporate governance yang terbaik.
2	Drs.DADANG DARUSMAN, MM	Komisaris	1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank, 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, otoritas jasa keuangan, dan/atau otoritas lainnya, 3. Bersama sama dengan komisaris utama mereviuw dan menyetujui rencana bisnis, 4. Bersama sama Dengan Komisaris utama mereviuw dan menyetujui laporan tahunan, 5. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan 6. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait.

Rekomendasi Kepada Direksi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT BPR BKK KAB. TEGAL (Perseroda) telah memiliki 2 (dua) orang anggota dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	PT BPR BKK KAB. TEGAL (Perseroda) Jumlah anggota Direksi sudah sesuai ketentuan tidak melampaui ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus test uji kemampuan dan kepatutan diangkat dan diberhentikan melalui keputusan RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di satu provinsi yang sama.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Pasal 25 (PT. BPR BKK KAB.TEGAL (perseroda) termasuk dalam BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar Rupiah
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Pasal 33 (Dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk etika kerja. waktu kerja dan rapat)
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Pasal 27 (Tidak ada dewan komisaris yang merangkap jabatan lebih dari 2 BPR atau BPRS lainnya)
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Sesama Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Pasal 25 (PT. BPR BKK KAB.TEGAL (perseroda) termasuk dalam BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar Rupiah
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Pasal 29 (tidak ada Dewan Pengawas) Dewan Komisaris telah menyelenggarakan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	4	Pasal 29 (tidak ada Dewan Pengawas)
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	4	Pasal 29 (tidak ada Dewan Pengawas)
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	4	Pasal 30 (tidak ada Dewan Pengawas)
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	4	Pasal 34 dan 35 (tidak ada Dewan Pengawas)

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pasal 36 telah dilaksanakan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Pasal 38 (tidak ada Dewan Pengawas)
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	5	(tidak ada Dewan Pengawas)
	Total nilai skala penerapan	28	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	5	(tidak ada Dewan Pengawas)
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,50	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. telah memiliki bagian Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	pedoman kerja sesuai dengan SE OJK No.7/SEOJK.03/2016
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	pelaksanaan Audit Intern independent terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	rekrutmen bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	belum sepenuhnya diterapkan masih perlu adanya pengembangan ketentuan agar sesuai dengan kondisi yang ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	termasuk BPR dengan modal inti kurang dari 50 Milyar Rupiah
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	pelaksanaa Audit Intern dilaksanakan secara memadai dan Independent
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	telah mengikutkan dalam pelatihan - pelatihan Audit internl. pada tahun 2018 telah mengikuti pendidikan sertifikasi auditor PERBAMIDA JATENG tanggal 27 - 29 November 2018
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Telah melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah menyampaikan laporan pokok-pokok fungsi kepatuhan pada tanggal 22 maret 2019 nomor surat 65/BPR BKK Kab.Tegal/III/2019 dan 24 Maret 2020 dengan Surat Nomor 67/BPR BKK Kab. Tegal/III/2020.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	termasuk PT BPR BKK KAB. TEGAL (Perseroda) dengan modal inti kurang dar 50 Milyar Rupiah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	telah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Menggunakan Sistem Informasi Realtime dari PT. MSO Purwokerto
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah ditandatangani oleh Direksi dan telah disampaikan kepada OJK sesuai surat nomor 14/BPR.BKK/Kab.Tgl/Lap/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan PD.BPR BKK KAB. TEGAL dan dipublikasikan dalam media massa pada tanggal 27 Maret 2020 dan dilaporkan ke OJK berdasarkan surat no 22/BPR.BKK/Kab.Tgl/Lap/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang laporan Publikasi Periode 31 Desember 2019
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pada posisi 31 Desember 2022 PT BPR BKK KAB. TEGAL (Perseroda) telah memiliki 2 (dua) orang anggota direksi yaitu Direktur utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Pada pasa 5 Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. (Direktur Utama berdomisili di Kabupaten Tegal dan Direktur Umum & Kepatuhan di wilayah Kota Tegal)
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Pasal 8 (Direksi tidak merangkap jabatan pada bank/perusahaan non bank atau lembaga lain)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Pasal 6 (Antara anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua)
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Pasal 17 (tidak ada penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan sesuai ketentuan yang berlaku)
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,59	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Pasal 9 (Dalam menjalankan tugasnya Direksi tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas tanpa batas)
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Pasal 12 (Direksi telah melaksanakan hasil temuan auditor intern. auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK sesuai dengan komitmen)
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Pasal 18 (Direksi melaporkan perkembangan bank secara berkala. laporan publikasi dan laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan OJK kepada dewan pengawas)
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pasal 21 (Telah melaksanakan musyawarah melalui rapat evaluasi kinerja pegawai guna perbaikan dan pengambilan kebijakan perusahaan)
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Pasal 23 (Telah dilaksanakan sesuai ketentuan/Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas dalam laporan tata kelola)
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Mengikuti pegawai pada setiap pelatihan dari Perbarindo. perbamida.OJK. atau lembaga lain.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Setiap anggota direksi telah ditetapkan fungsi tugas dan tanggungjawabnya masing masing dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan keputusan direksi yang
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Pasal 19 (direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib anggota direksi sesuai dengan keputusan direksi)
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Pasal 15 (Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada pemegang saham setiap akhir periode jabatan)
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Pasal 16 (kebijakan tentang kepegawaian telah dikomunikasikan kepada pegawai termasuk kenaikan pangkat/penghasilan atau kebijakan lain terkait kepegawaian/reward dan punishment)
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Pasal 21 (Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat)
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat kenaikan berupa peningkatan pertumbuhan bank, penyelesaian permasalahan dan pencapaian hasil
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan Laporan Penerapan tata Kelola ke Otoritas Jasa Keuangan Perbarindo dan Pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jalan Projosumarto II Talang Tegal

Nomor Telepon : 0283 3447492

Penjelasan Umum : Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemantauan penerapan tatakelola Bank Perkreditan Rakyat sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomo.13/POJK.03/2019 tentang pelaporan BPR dan BPRS melalui sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan , yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPR menyampaikan laporan penerapan tata kelola secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut OJK melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SOJK.03/2016 tentang PenerapanTata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut SEOJK Tata Kelola BPR. Penyampaian Transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan prinsip keterbukaan.(transparancy)sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. BPR mengungkapkan seluruh aspek transparansi tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini. BPR dapat menyampaikan penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan dan tidak termasuk dalam cakupan pada tabel penjelasan pada Bab II, dalam sistem POJK, sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing BPR.tata kelola Bank menerapkan prinsip - prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responcybility), indenpendensi(indenpendency) dan kewajaran (fairness).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah membentuk satuan kerja manajemen risiko dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	4	Beluma ada
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	Belum ada
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	5	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	5	0
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	5	0
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR terus meningkatkan Sistem Pengendalian Intern
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan risiko Kredit. Operasional. Kepatuhan dan risiko Likuiditas.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	0
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Telah dilaksanakan pelatihan terkait Manajemen Risiko.
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	3,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,32	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	laporan Profil Risiko telak dilaporkan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220221	Kegiatan Sosial	Donsi Bencana Banjir Lebaksiu	Warga Lebaksiu	1.500.000
2	20220324	Kegiatan Sosial	Bantuan darmasuci Relokasi warga dampak bencana Alam	warga Darmasuci	15.000.000
3	20220407	Kegiatan Sosial	Santunan Panti Asuhan (SLKT Kab.Tegal) Beras 3 Kwintal	SLKT Kab.Tegal	2.880.000
4	20220429	Kegiatan Sosial	Pembelian Lampu Gantung Masjid Agung Slawi	Masjid Agung Slawi	18.732.700
5	20220630	Kegiatan Sosial	PKE	0	2.617.000
6	20220630	Kegiatan Sosial	Hetero Space	0	1.036.000
7	20220630	Kegiatan Sosial	Pesonas	Pesonas	1.500.000
8	20220707	Kegiatan Sosial	Pembelian Hewan Qurban Idul Adha 1443	0	6.000.000
9	20220823	Kegiatan Sosial	Sumbangan Sosial Tanah Bergerak Ds Kajen lebaksiu	Ds Kajen	5.000.000
10	20220930	Kegiatan Sosial	Sumbangan Sosial Santunan pengobatan	0	3.000.000
11	20221209	Kegiatan Sosial	Peduli Gempa Cianjur	Perbarindo DPD Jateng	1.000.000
12	20221220	Kegiatan Sosial	bantuan Kegiatan Gathering Keluarga Besar Harapan (PKH)	PKH	2.500.000
13	20221220	Kegiatan Sosial	Kegiatan Harlah Ponpes Mambaul Maarif ke 108	Pompes Maarif	5.000.000
14	20221220	Kegiatan Sosial	Bantuan Kegiatan Konferensi Majelis Wakil Cabang NU Jejeg	Ds Jejek	2.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sebagai wujud kegiatan sosial

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ditemukan adanya penyimpangan Internal (Internal fraud) pada perusahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	03-02-2022	2	Paparan rencana pembangunan gedung PT BPR BKK KAB. TEGAL (Perseroda)
2	18-04-2022	2	Rapat persiapan pengadaan kegiatan tanah urug dan talud
3	18-07-2022	2	Pembahasan hasil pemeriksaan OJK
4	08-11-2022	2	Persiapan pengadaan Calon Pegawai PT BPR BKK KAB. TEGAL 9Perseroda)
5	09-12-2022	2	Pembahasan pengunduran diri dari PPK dan sangsi terhadap pegawai Cabang Dukuhturi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H.KHOJIN,SH.MM	Direktur Utama	Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan, Menguasai,memelihara dan mengurus kekayaan dan Direksi mengatur pola pembagian tugas masing masing.
2	Dra. AMINULIS SETYOWATI	Direktur	Merumuskan setrategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank, mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi, Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	H.KHOJIN,SH.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Dra. AMINULIS SETYOWATI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada Perusahaan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	MUHAMMAD MASROFI, S.SOS,M.SI	5	0	100,00
2	Drs.DADANG DARUSMAN, MM	5	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite